

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah kabupaten maupun kota, DPRD mempunyai peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD pada era keterbukaan informasi saat ini, memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat yang diwakilinya. Mulai dari mengartikulasikan aspirasi konstituen dalam mekanisme legislasi di parlemen, mendorong lembaga eksekutif agar senantiasa melahirkan kebijakan publik yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal tersebut, maka lembaga DPRD perlu membangun citra dan opini yang positif di tengah masyarakat agar kepercayaan publik terhadap wakil rakyatnya yang duduk di institusi legislatif daerah dapat membaik.

Kepercayaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai produk yang dihasilkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya DPRD mulai dari produk kebijakan yang dihasilkan hingga dengan produk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi mengindikasikan segala produk yang dihasilkan DPRD dapat diterima oleh masyarakat dengan cara mengapresiasi dan merespon positif terhadap kebijakan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tersebut. Jika terjadi hal sebaliknya, semisal kebijakan yang dihasilkan oleh wakil rakyat tidak memenuhi ekspektasi masyarakat maka tingkat kepercayaan publik akan memburuk dengan sendirinya.

Secara spesifik, hal yang dapat menyebabkan perbaikan kepercayaan

publik memburuk dapat terjadi karena terdapat banyaknya kebijakan legislatif yang tidak mendukung kepentingan publik maupun kebijakan yang dihasilkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Disamping itu, sikap dan perilaku buruk yang ditunjukkan oleh anggota dewan, seperti gaya hidup yang hedonis dan berfoya-foya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap wakil mereka yang duduk di legislatif. Sebagaimana yang dirilis oleh Kompas.com pada tanggal 2 Juli 2023, hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia membeberkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik masih rendah. Masyarakat yang cukup percaya pada DPR dalam survei Indikator terkini mencapai 61,4 persen, yang sangat percaya 7,1 persen dan kurang percaya 26,6 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga DPR berada di urutan kedua terbawah dalam kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Problem terjadinya kurang efektif dalam kepercayaan publik terhadap lembaga politik dewan perwakilan rakyat diungkap oleh La Husen Zuada dan Muhammad Ahsan Samad dalam Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintah Volume 1 April 2019 yang menyatakan ketidakpercayaan tersebut lebih disebabkan oleh karena DPRD belum efektif dalam bekerja, belum representatif dalam kebijakan dan kinerja yang belum dapat dikatakan akuntabel. Salah satu contohnya, Di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara persoalan yang menjadi keluhan terhadap kinerja DPRD yaitu berkaitan dengan kehadiran dan keaktifan anggota dalam rapat-rapat penting seperti rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD. Persoalan rendahnya kehadiran anggota DPRD Sulawesi Tenggara ini berkebalikan dengan tunjangan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Kenaikan tunjangan ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Peningkatan tunjangan dewan ini seyogyanya diikuti dengan peningkatan kinerja anggota legislatif serta keaktifan para anggota dewan dalam kegiatan rapat yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD.

Fenomena turunnya kepercayaan atau tidak efektif publik terhadap wakil rakyat dalam lembaga legislatif juga terjadi pada institusi dewan yakni DPRD Kabupaten Sumenep. Hal ini seiring dengan berjalannya dinamika masyarakat yang menjadi semakin kritis dengan apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk DPRD. Lebih-lebih, era keterbukaan informasi saat ini memberi ruang dan kesempatan kepada khalayak untuk mengetahui secara banyak informasi mengenai sepak terjang wakil rakyat mereka di parlemen. Apalagi jika kinerja anggota dewan dirasa belum memenuhi harapan dan ekspektasi publik, maka kondisi tersebut bisa menjatuhkan dan mendegradasikan citra legislatif ditengah masyarakat.

Salah satu pemberitaan negatif tentang DPRD Kabupaten Sumenep yang menarik untuk diangkat adalah peristiwa pesta pora yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Sumenep diatas kapal pesiar saat mereka melakukan kunjungan ke luar daerah. Pada tanggal 27 Juni 2023, TVONENEWS.com memberitakan aksi aliansi masyarakat Sumenep yang bersuara menyampaikan aspirasi terkait gaya hedonisme wakil rakyat Kabupaten Sumenep saat melakukan kunjungan keluar daerah.

Masyarakat mengkritik dan mencela gaya hidup anggota DPRD yang berfoya foya dengan berjoget dan menghamburkan uang saat melakukan kunjungan ke Kota Makassar. Para aktivis menyampaikan orasi kekecewaan terhadap wakil rakyat terhadap beredarnya video hedon yang dilakukan oleh belasan anggota dewan yang tergabung dalam pansus Penyertaan Modal PDAM. Aksi joget dan sawer uang yang dilakukan oleh anggota dewan saat menaiki perahu pinisi tersebut dianggap melukai hati dan perasaan masyarakat Sumenep.

Viralnya pemberitaan yang menyoroti kelakuan oknum anggota DPRD di atas kapal pesiar tersebut, ternyata terus menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat Madura. Salah satunya budayawan Madura, Ibnu Hajar mengatakan situasi dan kondisi rakyat saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga sikap hedonisme wakil rakyat perlu dihentikan. Lebih lanjut, Ibnu

Hajar juga menjelaskan bahwa gaya hedonisme merupakan sebuah persoalan yang sangat tidak disukai oleh publik luas, terlebih gaya tersebut diperankan oleh sosok pejabat atau wakil rakyat, yang seharusnya mereka merupakan sosok tauladan dan menjadi panutan rakyatnya, sehingga dirinya berharap hal serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Pemberitaan negatif tentang oknum anggota DPRD Sumenep yang melakukan pesta di atas kapal pesiar, dapat diuraikan lebih detail dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pemberitaan DPRD Sumenep

No	Nama Media	Judul Artikel	Link Artikel	Jumlah Views
1.	TV One News (27 Juni 2023)	Buntut Viralnya Video Gaya Hedon DPRD Sumenep, Warga Lakukan Demo Hingga Sawer Duit Ke Legislatif	https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/133379-buntut-viralnya-video-gaya-hedon-dprd-sumenep-warga-lakukan-demo-hingga-sawer-duit-ke-legislatif	1.450
2.	Memo Online (28 Juni 2023)	Dinilai Kurang Pantas Wakil Rakyat Joget - Joget Serta Nyawer Mahasiswi Magang Diatas Kapal, AMSB Kepung Kantor DPRD Sumenep	https://www.memoonline.co.id/read/14247/20230628/083533/dinilai-kurang-pantas-wakil-rakyat-joget-joget-serta-nyawer-mahasiswi-magang-diatas-kapal-amsb-kepung-kantor-dprd-sumenep/	1487
3.	Suara Indonesia (2 Mei 2023)	Joget Sambil Nyawer Oknum DPRD Sumenep Dinilai Pertontonkan Hilangnya Nurani dan Empati Atas Rakyat	https://www.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/64505ecfa8bab/Joget-Sambil-Nyawer-Oknum-DPRD-Sumenep-Dinilai-Pertontonkan-Hilangnya-Nurani-dan-Empati-Atas-Rakyat	530
4.	Liputan 6 (19 Juni 2023)	Viral Video Anggota DPRD Sumenep Berpesta dan Sewa Biduan di Atas Kapal	https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5323380/viral-video-anggota-dprd-sumenep-berpesta-dan-sewa-biduan-di-atas-kapal?page=2	2576
5.	Bangsapedia (2 Mei 2023)	Viral Video Anggota DPRD Sumenep Joget dan Nyawer, Ini Kata Warga	https://www.bangsapedia.com/posts/viral-video-anggota-dprd-sumenep-joget-dan-nyawer-ini-kata-warga	3832

6.	Beritata (18 Juni 2023)	Terjadi Lagi Perilaku Memalukan! Anggota DPRD Sumenep JOGET di Atas Kapal Pinisi Sambil Nyawer Biduan	https://www.beritata.com/terjadi-lagi-perilaku-memalukan-anggota-dprd-sumenep-joget-di-atas-kapal-pinisi-sambil-nyawer-biduan/	668
----	----------------------------	--	---	-----

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Pemberitaan negatif tersebut, tentu telah memberikan dampak yang kurang baik bagi lembaga pemerintahan, khususnya DPRD Kabupaten Sumenep. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kepercayaan dikalangan masyarakat. Pemberitaan buruk yang menyangkut lembaga legislatif menjadi cukup akrab terdengar di telinga masyarakat. Oleh karenanya, Humas DPRD Sumenep perlu lebih tampil dan menunjukkan kinerjanya dalam memberikan informasi yang jelas, transparan, akurat serta *up to date* kepada khalayak masyarakat Sumenep.

Humas memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara lembaga, media dengan publiknya. Sebagaimana definisi humas menurut Cultip, Center & Broom, bahwa pengertian humas merupakan fungsi manajemen yang memiliki tujuan untuk membangun dan memperbaiki hubungan yang baik dan bermanfaat antara lembaga dengan publiknya. Kemudian, hubungan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Dimana suatu organisasi atau instansi dapat dikatakan berhasil apabila terjalin hubungan yang baik antara internal ataupun eksternal (public). Begitu juga sebaliknya, suatu lembaga atau instansi dapat dikatakan gagal apabila tidak berhasil menjalin hubungan yang baik antara pihak internal ataupun eksternal (public), (M Cultip, Center, and Broom, 1998).

Humas sebagai sebuah divisi yang mempunyai peran yang signifikan dalam sebuah organisasi atau instansi, maka humas memiliki fungsi, tugas dan peran spesifik yang berdampak besar terhadap kegiatan organisasi atau instansi. Disamping menjalankan tugas dan fungsinya, humas memiliki andil sebagai komunikator yang berpengaruh dalam membangun citra kelembagaan. Dari peran humas yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka peran humas

terbesar bagi sebuah organisasi adalah menciptakan, membangun, memperbaiki dan menjaga citra organisasi dikalangan publiknya, Humas memiliki kewajiban untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis dengan publik. Mengembangkan keserasian hubungan dengan pihak luar tentu saja harus terus digelorakan secara terus menerus agar citra baik yang telah dibangun di masyarakat dapat dipertahankan di masa masa mendatang.

Berkenaan dengan upaya memperbaiki kepercayaan publik pasca pemberitaan negatif tentang pesta oknum anggota DPRD di atas kapal pesiar, maka humas DPRD Sumenep merespon persoalan tersebut melalui beberapa langkah dan pendekatan strategi untuk menjaga citra positif lembaga DPRD Kabupaten Sumenep. Program Humas yang dilakukan dengan cara pendekatan kemasyarakatan, melalui mekanisme sosial *cultural* dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dari pendapat dan harapan masyarakat yang terekam pada setiap berita atau liputan sebagainya yang dimuat diberbagai media massa. Dalam hal ini, Humas DPRD Sumenep mengundang secara langsung pihak-pihak tersebut dengan cara proses sosialisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menginformasikan visi misi, program kerja, dan terutama menginformasikan kepada masyarakat tentang program yang dimiliki kehumasan yakni program kegiatan forum komunikasi masyarakat dengan DPRD dimana Humas memfasilitasi secara langsung pertemuan antara elemen masyarakat dengan pihak anggota dewan melalui forum resmi tersebut.

Pada strategi operasional ini, Humas DPRD Sumenep berperan dalam program forum komunikasi masyarakat ini hanya melalui opini atau berita, yang dimana humas membagi menjadi 4 kriteria berita yaitu positif (bersifat membangun citra perusahaan, netral (bersifat biasa saja), negatif (bersifat mengancam turunnya citra perusahaan, dan kritis (bersifat sangat membahayakan terpuruknya citra perusahaan). Dengan demikian humas lebih mudah memilih tindakan dalam menentukan calon sasaran program yang akan diundang, agar dapat mencapai tujuan utama yaitu membangun citra

perusahaan dimata masyarakat.

Humas DPRD Sumenep juga melakukan pendekatan kerjasama sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kepercayaan publik. Pendekatan kerja sama ini bertujuan agar humas berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan kalangan eksternal melalui kerjasama pemberitaan dengan media cetak, media online maupun media elektronik. Keseluruhan kombinasi strategi dimaksud, sejalan dan berpijak pada bentuk strategi humas atau aspek-aspek pendekatan humas dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif antara organisasi dengan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Rosady Ruslan (2017:142) diantaranya melalui strategi pendekatan operasional serta melalui strategi pendekatan kerjasama.

Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi strategi yang diterapkan Humas DPRD Sumenep dalam memperbaiki kepercayaan publik pasca pemberitaan negatif tentang pesta oknum anggota DPRD di atas kapal pesiar. Meski tidaklah mudah untuk menerapkan kombinasi strategi tersebut, Humas DPRD selalu berupaya untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi melalui langkah-langkah yang tepat guna menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga secara berkesinambungan citra lembaga dewan di Kabupaten Sumenep sesuai harapan dan keinginan masyarakat.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah ini adalah “Bagaimana strategi Humas DPRD Sumenep dalam memperbaiki kepercayaan publik pasca pemberitaan negatif tentang pesta oknum anggota DPRD di atas kapal pesiar?”.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci mengenai strategi yang ditempuh Humas DPRD Sumenep

dalam memperbaiki kepercayaan publik pasca pemberitaan negatif tentang pesta oknum anggota DPRD di atas kapal pesiar.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi seluruh pihak adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan atau pemerintah, khususnya yang berada di bidang kehumasan untuk dapat menyusun kebijakan yang tepat dalam memperbaiki dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi atau lembaga pemerintah.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, bahan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, sehingga dapat digunakan sebagai penyempurnaan dalam melaksanakan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi humas atau *public relation*.
3. Penelitian ini dapat menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi.